

DINAMIKA PENGORGANISASIAN MASYARAKAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN SOSIAL: KAJIAN KEPUSTAKAAN

Yakin Ngguna¹, Ribka Paulus², Fridolin Saa³

¹⁻³ Prodi Sosiologi, FISIPOL, Universitas Kristen Tentena

email: yngguna19@gmail.com

ABSTRACT

Social development is currently shifting toward a human-centered paradigm, yet its implementation is often hindered by the phenomena of distorted development and social exclusion. This study aims to analyze the theoretical dynamics of community organizing, evaluate its implications for welfare, and synthesize an effective organizing model. The method employed is a qualitative literature review with a thematic synthesis approach applied to various reputable academic publications. The results indicate that community organizing is a systematic process ranging from natural initial engagement to self-reliant action to establish a just social order. These dynamics are proven to trigger empowerment and multidimensional social inclusion by optimizing the pillars of social capital, which include trust, norms, and networks. The study's primary conclusion asserts that community organizing is not merely an administrative formality but an instrument for transforming relations toward collaborative governance. The success of sustainable social development depends heavily on the synergy between individual self-reliance, community cooperation, and inclusive government policy support to overcome structural barriers for marginalized groups.

Keywords : *Community Organizing, Public Policy, Social Capital, Social Development, Social Inclusion.*

ABSTRAK

Pembangunan sosial saat ini mengalami pergeseran menuju paradigma yang berpusat pada manusia, namun implementasinya sering kali terhambat oleh fenomena pembangunan yang terdistorsi dan eksklusif sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika teoretis pengorganisasian masyarakat, mengevaluasi implikasinya terhadap kesejahteraan, serta menyintesis model pengorganisasian yang efektif. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan kualitatif dengan pendekatan sintesis tematik terhadap berbagai publikasi akademik bereputasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengorganisasian masyarakat merupakan proses sistematis yang dimulai dari pendekatan awal yang alamiah hingga aksi mandiri untuk membangun tatanan sosial yang adil. Dinamika ini terbukti memicu pemberdayaan dan inklusi sosial multidimensi dengan mengoptimalkan pilar modal sosial yang mencakup kepercayaan, norma, dan jaringan. Simpulan utama penelitian menegaskan bahwa pengorganisasian masyarakat bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen transformasi relasi menuju tata kelola kolaboratif. Keberhasilan pembangunan sosial yang berkelanjutan sangat bergantung pada sinergi antara kemandirian individu, kerjasama komunitas, dan dukungan kebijakan pemerintah yang inklusif untuk mengatasi hambatan struktural bagi kelompok marginal.

Kata Kunci : *Pengorganisasian Masyarakat, Inklusi Sosial, Kebijakan Publik, Modal Sosial, Pembangunan Sosial.*

PENDAHULUAN

Paradigma pembangunan global saat ini telah mengalami transformasi signifikan, bergeser dari model konvensional yang secara eksklusif menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi sektoral (top-down) menuju pendekatan pembangunan sosial yang lebih holistik

dan berpusat pada manusia (*people-centered development*) (Subhani et al., 2014). Pembangunan sosial dalam konteks ini dipahami sebagai suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dengan menyelaraskan kebijakan sosial dan proses pembangunan ekonomi secara dinamis (Puspitasari, 2016; Midgley, 1995). Dalam upaya mencapai visi tersebut, pengorganisasian masyarakat (*community organizing*) muncul sebagai instrumen strategis yang berfungsi sebagai kerangka proses menyeluruh untuk memecahkan permasalahan di tengah rakyat melalui pendekatan yang secara sengaja melibatkan masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama pembangunan (Tan & Topatimasang, 2003; Mujahidin, 2019). Inti dari dinamika ini adalah pemberdayaan (*empowerment*), yakni sebuah proses kolaboratif untuk membangkitkan kesadaran akan potensi lokal, memperkuat akses terhadap peluang ekonomi, dan menciptakan kemandirian agar masyarakat mampu mengontrol kehidupan mereka sendiri di tengah struktur sosial yang seringkali opresif (Selly, 2025; Suharto, 2005; Prijono & Pranarka, 1996). Dengan demikian, pengorganisasian masyarakat tidak lagi dipahami sebagai sekadar output kebijakan, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang esensial dalam mendorong keadilan sosial dan pembangunan yang inklusif (Ariyanto, 2024).

Meskipun paradigma pembangunan telah bergeser ke arah yang lebih inklusif, realitas di lapangan menunjukkan adanya tantangan signifikan yang menghambat efektivitas pembangunan sosial secara berkelanjutan. Masalah mendasar muncul dari fenomena pembangunan yang terdistorsi, di mana orientasi pertumbuhan ekonomi yang sempit sering kali menghasilkan residu masalah sosial seperti kemiskinan kronis dan ketimpangan karena paradigma yang salah dalam mengabaikan kesejahteraan manusia secara paripurna (Midgley, 1995; Puspitasari, 2016). Kondisi ini diperumit oleh adanya hambatan struktural dan eksklusi sosial, terutama bagi kelompok marginal yang menghadapi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya tingkat partisipasi aktif, serta kebijakan yang kurang selaras dengan potensi lokal (Ariyanto, 2024; Mujahidin, 2019). Fenomena ini semakin diperparah oleh praktik pengorganisasian masyarakat yang sering kali hanya bersifat formalitas administratif; dalam banyak kasus, pembentukan lembaga atau kelompok komunitas tidak diikuti dengan rencana tindak lanjut yang konkret atau penguatan kapasitas yang berkelanjutan, sehingga gagal menjadi motor penggerak transformasi sosial yang nyata (Indriyany & Godjali, 2023; Mujahidin, 2019). Tanpa adanya sinergi yang efektif antara intervensi eksternal dan inisiatif lokal, dinamika pengorganisasian tersebut justru berisiko melanggengkan ketergantungan masyarakat pada bantuan luar (Selly, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dinamika teoretis dan praktis pengorganisasian masyarakat sebagai instrumen vital dalam akselerasi pembangunan sosial (Tan & Topatimasang, 2003; Mujahidin, 2019). Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi serangkaian tahapan pengorganisasian—mulai dari metode pendekatan awal hingga perumusan strategi perubahan sosial yang terarah—guna memastikan keterlibatan masyarakat secara autentik sebagai subjek atau pelaku utama pembangunan (Tan & Topatimasang, 2003; Ali Hanapiah Muhi, 2021). Selanjutnya, penelitian ini berupaya menganalisis implikasi dari berbagai strategi pengorganisasian, baik pada aras individu, komunitas, maupun pemerintah, terhadap pencapaian indikator pembangunan sosial yang mencakup keadilan sosial, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat secara paripurna (Midgley, 1995; Suharto, 2005; Sumodiningrat, 1997). Melalui tinjauan kepustakaan yang sistematis, studi ini bermaksud menyintesis sebuah model pengorganisasian yang efektif untuk memperkuat kapasitas lokal dalam menghadapi

tantangan krisis multidimensi serta mendorong transformasi relasi menuju tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) (Ariyanto, 2024). Dengan demikian, luaran dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis sekaligus rujukan konseptual bagi perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Meskipun literatur mengenai pengembangan komunitas dan pembangunan sosial telah berkembang pesat, terdapat sejumlah kesenjangan kritis yang membatasi pemahaman komprehensif mengenai efektivitas pengorganisasian di lapangan. Pertama, pemahaman terhadap perspektif kelompok marginal masih sangat terbatas; penelitian yang ada sering kali gagal menangkap pengalaman subjektif serta hambatan struktural spesifik yang menghalangi partisipasi aktif mereka dalam proses pengambilan keputusan (Ariyanto, 2024). Selain itu, teridentifikasi adanya kelangkaan dokumentasi sistematis mengenai keberhasilan strategi kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI) dalam konteks pengorganisasian masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang (Ariyanto, 2024; Grant et al., 2023). Lebih jauh lagi, kajian sebelumnya cenderung bersifat fragmentaris dan sektoral—sering kali hanya berfokus pada dimensi tunggal seperti mitigasi bencana atau kebijakan publik tertentu—sehingga mengabaikan keterkaitan multidimensi yang kompleks antara modal sosial, dinamika gender, dan transformasi relasi kekuasaan secara integratif (Ariyanto, 2024; Subhani et al., 2014). Kesenjangan inilah yang mendasari urgensi penelitian ini untuk menyajikan tinjauan literatur yang menyintesis elemen-elemen tersebut guna merumuskan model pengorganisasian yang tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga transformatif dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*). Metode ini berfungsi sebagai panduan dalam mengkaji suatu masalah penelitian secara mendalam melalui penelusuran kritis terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Fokus utama dari pendekatan ini adalah mensintesis berbagai temuan teoretis dan empiris untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai dinamika pengorganisasian masyarakat dan implikasinya terhadap pembangunan sosial.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data mencakup publikasi akademik yang telah melalui proses tinjauan sejawat (*peer-reviewed*), buku teks, jurnal ilmiah, tesis, serta laporan resmi pemerintah yang berkaitan dengan tema pengorganisasian masyarakat, modal sosial, dan pembangunan sosial.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mencatat, dan menganalisis materi pustaka. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis menggunakan perangkat lunak Publish or Perish versi 8 dengan basis data Google Scholar.

Kriteria pemilihan literatur ditetapkan berdasarkan kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti "*community organizing*", "*social development*", "*community development*", dan "*social capital*". Pencarian awal mencakup ratusan dokumen (sekitar 50 dokumen) yang kemudian diseleksi menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat, yakni relevansi materi dengan fokus penelitian dan periode publikasi tertentu untuk menjaga kemutakhiran data.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena yang dikaji secara spesifik dan mendalam. Proses analisis dilakukan melalui sintesis tematik terhadap artikel-artikel yang telah dipilih. Peneliti melakukan organisasi terhadap temuan penelitian terdahulu, melakukan elaborasi antar konsep, dan merumuskan ringkasan yang komprehensif untuk menjawab tujuan penelitian.

Prosedur penelitian ini mengikuti langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

1. Mendefinisikan lingkup dan konteks topik: Menetapkan batasan masalah terkait dinamika pengorganisasian dan pembangunan sosial.
2. Identifikasi bahan referensi: Melakukan pencarian materi yang relevan menggunakan mesin pencari akademik.
3. Seleksi dan kategorisasi referensi: Memilih literatur yang paling sesuai dan mengelompokkannya berdasarkan tema.
4. Organisasi temuan penelitian: Menyusun poin-poin penting dari literatur yang telah dikaji.
5. Penyusunan tinjauan komprehensif: Menuliskan hasil analisis dalam narasi ilmiah yang terstruktur.
6. Penarikan kesimpulan: Merumuskan hasil akhir dan implikasi dari kajian literatur yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika dan Tahapan Proses Pengorganisasian Masyarakat

Berdasarkan kajian literatur, pengorganisasian masyarakat dipahami bukan sekadar sebagai instrumen administratif, melainkan sebuah kerangka proses menyeluruh untuk memecahkan masalah ketidakadilan dan membangun tatanan sosial yang lebih adil (Mujahidin, 2019; Tan & Topatimasang, 2003). Dinamika ini melibatkan serangkaian tahapan sistematis yang bersifat partisipatif. Proses dimulai dengan pendekatan awal yang dilakukan secara wajar dan alamiah untuk membangun kepercayaan masyarakat (Tan & Topatimasang, 2003). Selanjutnya, peran pengorganisir bergeser menjadi fasilitator yang memperlancar keterlibatan warga agar pada akhirnya mereka mampu melakukan aksi secara mandiri (Tan & Topatimasang, 2003).

Perancangan strategi menjadi elemen krusial yang mencakup analisis keadaan mikro dan makro, perumusan kebutuhan, serta penilaian sumber daya lokal (Tan & Topatimasang, 2003). Implementasi aksi nyata dilakukan melalui pengarahan tindakan bersama dan penataan struktur organisasi yang sepenuhnya dikendalikan oleh masyarakat setempat, guna menjamin keberlanjutan tradisi pengorganisasian secara internal (Mujahidin, 2019; Tan & Topatimasang, 2003).

Strategi Pembangunan Sosial dan Paradigma Berpusat pada Manusia

Kajian pustaka menunjukkan bahwa pembangunan sosial merupakan proses perubahan terencana untuk meningkatkan taraf hidup penduduk melalui penyesuaian kebijakan sosial dengan proses pembangunan ekonomi (Midgley, 1995; Puspitasari, 2016). Terdapat tiga strategi utama pembangunan sosial yang diidentifikasi:

1. Strategi Individualistis: Menekankan pada peningkatan fungsi sosial individu melalui mekanisme pasar (Midgley, 1995; Puspitasari, 2016).
2. Strategi Komunitarian: Menempatkan masyarakat sebagai pusat kegiatan melalui pengembangan komunitas lokal dan kerja sama kelompok (Midgley, 1995; Puspitasari, 2016).
3. Strategi Statis: Melibatkan peran dominan pemerintah dalam mengkoordinasikan kebijakan sosial secara kolektif (Midgley, 1995; Puspitasari, 2016).

Literatur kontemporer menekankan pentingnya paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (*people-centered development*), di mana masyarakat dipandang sebagai subjek utama, bukan sekadar objek pembangunan (Subhani et al., 2014). Pendekatan ini mengutamakan keberlanjutan penghidupan (*sustainable livelihood*) dengan mengembangkan potensi lokal untuk mentransformasi kondisi rentan menjadi mandiri (Subhani et al., 2014).

Implikasi Pengorganisasian terhadap Pemberdayaan dan Inklusi Sosial

Pengorganisasian masyarakat memiliki implikasi langsung terhadap pemberdayaan (*empowerment*), yaitu proses kolaboratif untuk memberikan daya kepada pihak yang lemah agar mampu membangun dirinya sendiri (Selly, 2025; Suharto, 2005). Keberhasilan pemberdayaan sangat ditentukan oleh kekuatan modal sosial yang mencakup unsur kepercayaan (*trust*), norma, dan jaringan sosial yang memungkinkan aksi kolektif berjalan efisien (Rahmatullah et al., 2023).

Lebih lanjut, pengorganisasian yang efektif mendorong terciptanya inklusi sosial yang bersifat multidimensi, mencakup ranah spasial, sosial, lingkungan, ekonomi, dan politik (Ariyanto, 2024). Hal ini krusial untuk memastikan kelompok marginal, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok perempuan, memiliki akses yang setara terhadap peluang ekonomi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan (Ariyanto, 2024; Puspitasari, 2016).

Hambatan Struktural dan Fenomena Formalisme Organisasi

Meskipun pengorganisasian menawarkan potensi transformatif, literatur mengidentifikasi tantangan signifikan berupa hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan kualitas sumber daya manusia, rendahnya partisipasi aktif, serta kurangnya kesadaran masyarakat di wilayah rawan (Mujahidin, 2019). Sementara itu, hambatan eksternal mencakup akses terbatas terhadap informasi dan infrastruktur, serta kebijakan yang sering kali kurang selaras dengan potensi lokal (Selly, 2025).

Temuan penting lainnya adalah adanya fenomena formalisme administratif, di mana lembaga atau kelompok masyarakat (seperti kelompok tangguh bencana) dibentuk hanya

untuk memenuhi prasyarat birokrasi tanpa adanya rencana tindak lanjut yang konkret atau peningkatan kapasitas yang berkelanjutan (Indriyany & Godjali, 2023; Mujahidin, 2019). Kondisi ini berisiko melanggengkan ketergantungan pada bantuan eksternal dan menghambat pencapaian kemandirian masyarakat yang hakiki (Selly, 2025).

Sinergi Inklusi Sosial, Modal Sosial, dan Strategi Pemberdayaan dalam Pembangunan Masyarakat Inklusif

Guna memberikan gambaran komprehensif mengenai keterkaitan sistematis antara fondasi inklusivitas, penguatan modal sosial, dan berbagai strategi pemberdayaan yang telah dibahas sebelumnya, Gambar 1 berikut menyajikan kerangka kerja integratif dalam mewujudkan pembangunan desa yang berdaya dan tangguh

Gambar 1. Kerangka Kerja Integratif



Visualisasi di atas menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sosial yang berkelanjutan sangat bergantung pada integrasi inklusi sosial multidimensi dan pengarusutamaan gender yang ditopang oleh tiga pilar modal sosial, kepercayaan, norma, serta jaringan agar dapat memastikan partisipasi masyarakat yang bermakna dan bukan sekadar formalitas administratif. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara kemandirian individu, kerja sama kolektif masyarakat, dan dukungan strategis pemerintah melalui kebijakan inklusif menjadi kunci utama dalam menurunkan tingkat kerentanan sosial dan ekonomi di tingkat lokal

Kesimpulan dan Saran

Kajian ini menyimpulkan bahwa dinamika pengorganisasian masyarakat merupakan proses transformatif yang harus melampaui sekadar formalitas administratif guna menjadi solusi atas fenomena pembangunan yang terdistorsi. Dinamika teoretis yang dimulai dari tahap pendekatan awal yang alamiah hingga perancangan strategi perubahan sosial yang partisipatif membuktikan bahwa pengorganisasian yang efektif mampu mengoreksi

paradigma pembangunan yang hanya berorientasi ekonomi, yang selama ini justru meninggalkan residu kemiskinan dan ketimpangan. Evaluasi terhadap berbagai strategi pembangunan sosial menunjukkan bahwa kesejahteraan dan kemandirian masyarakat hanya dapat dicapai melalui sinergi tiga pilar utama: dorongan kemandirian ekonomi pada aras individu, kerjasama harmonis dalam pemanfaatan aset lokal di tingkat komunitas, serta dukungan kebijakan inklusif dan infrastruktur dari pemerintah.

Lebih lanjut, sintesis model pengorganisasian yang efektif untuk menghadapi tantangan krisis multidimensi mensyaratkan adanya inklusi sosial yang multidimensi serta pengarusutamaan gender guna mengatasi hambatan struktural dan eksklusif terhadap kelompok marginal. Model ini harus berakar kuat pada tiga pilar modal sosial, yakni kepercayaan (trust), norma sosial, dan jaringan (networks), yang berfungsi sebagai perekat utama kesatuan anggota kelompok. Dengan memastikan adanya partisipasi bermakna dalam setiap pengambilan keputusan, pengorganisasian masyarakat tidak lagi terjebak pada pembentukan lembaga yang bersifat formalitas, melainkan menjadi instrumen pemberdayaan yang autentik untuk membangun ketangguhan komunitas dan mewujudkan keadilan sosial secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, K. (2024). Community, village, gender, and social inclusion: A literature review. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, 3(2), 62-74. <https://doi.org/10.32734/ljsp.v3i2.18038>
- Grant, M. L., Nguyen, T. T., Vieira, A., Niner, S. L., & Roche, C. (2023). Working together: A study of civil society partnerships between WASH (water, sanitation, and hygiene) and GESI (gender equality and social inclusion) organisations in Timor-Leste. *Frontiers in Water*, 5. <https://doi.org/10.3389/frwa.2023.1047955>
- Indriyany, I. A., & Godjali, M. R. (2023). Portrait of gender and development in village area, do they shape inclusivity? *Journal of Governance*, 8(4), 22204. <https://doi.org/10.31506/jog.v8i4.22204>
- Midgley, J. (1995). *Social development: The developmental perspective in social welfare*. Sage Publications Ltd.
- Muhi, A. H. (2021). *Wisata pembangunan desa suatu autokritik*. Insistpress.
- Mujahidin, M. I. (2019). *Pengorganisasian masyarakat dalam mitigasi bencana banjir melalui Kelompok Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Ngadirejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban [Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya]*. Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Prijono, O. S., & Pranarka, A. M. W. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, kebijakan, dan implementasi*. Centre for Strategic and International Studies.
- Puspitasari, R. (2016). *Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sosial: Studi pada Program Keluarga Harapan (PKH)*. Neliti.

- Rahmatullah, Kusmin, A. F., & Hendrawan. (2023). Studi literatur: Peran modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat. *Arajang: Jurnal Ilmu Sosial Politik*, 6(1), 49-58. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/arajang/index>
- Selly, R. N. (2025). Upaya mengembangkan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan (Studi literatur). *Hipotesa*, 19(1), 69-78.
- Subhani, Hasan, K., & Mardhiah, A. (2014). Kajian kritis komunikasi sosial pembangunan (Studi komunikasi sosial pembangunan pemerintah Aceh; Strategi menuju people centred development). *Jurnal SUWA*, 12(1), 63-85.
- Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Refika Aditama.
- Sumodiningrat, G. (1997). *Pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat*. PT. Bina Rena Pariwara.
- Tan, J. H., & Topatimasang, R. (2003). *Mengorganisir rakyat: Refleksi pengalaman pengorganisasian rakyat di Asia Tenggara*. SEAPCP-REaD/INSIST Press.